

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik menyikapi adanya polemik mengenai rencana kenaikan dana bantuan partai politik hampir sepuluh kali lipat yang akan diberikan pada tahun anggaran 2018. Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian DPC Partai Gerindra Kota Surabaya yang berhak menerima bantuan keuangan partai politik dari pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait proses pengajuan, penggunaan hingga pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik di Kota Surabaya secara umum dan DPC Partai Gerindra Kota Surabaya secara khusus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) partai politik mendapati permasalahan dalam menggunakan dana bantuan karena tidak adanya buku pedoman penggunaan dana bantuan keuangan politik; (2) Terdapat partai politik terlambat mengumpulkan laporan pertanggungjawaban melebihi tenggat waktu yang diberikan; (3) Partai politik telah menggunakan dana bantuan keuangan yang diterimanya sesuai dengan peraturan dan telah melalui pemeriksaan BPK sehingga penggunaan dana bantuan yang diterima partai politik dapat dipertanggungjawabkan; (4) Dana bantuan partai politik yang diberikan pemerintah dapat menunjang keperluan operasional partai politik sehingga dapat meningkatkan profesionalitas partai politik penerima dana bantuan keuangan tersebut.

Kata kunci: Akuntabilitas, Bantuan keuangan pemerintah, Partai politik

ABSTRACT

This study aims to find out how the process of submission, use up to accountability of financial aid received by political parties the aid funds is provided by the government to political parties addressing the polemic about the plan of increase in political party aid funds nearly ten times that will be given in fiscal year 2018. This study took the subject of research DPC Party Gerindra City Surabaya is entitled to receive financial support from political parties from the Government of Surabaya. This research uses qualitative research methodology by collecting data through interviews and documentation studies conducted to obtain information related to the process of submission, use up to accountability of financial aid received by political parties in Surabaya in general and DPC Gerindra Party of Surabaya City in particular. Based on the results of the study it was found that, (1) political parties found problems in using aid funds due to the absence of a manual on the use of political financial aid funds; (2) There are political parties late in collecting accountability reports beyond the deadline; (3) Political parties have used the financial aid they receive in accordance with the rules and have been through the BPK audit so that the use of aid funds received by political parties can be accounted for; (4) Political party support funds provided by the government can support the operational needs of political parties so as to enhance the professionalism of the political parties receiving the financial aid.

Keywords: Accountability, Government financial aid, Political party